

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian upah lembur pekerja pada PT Karyatama Mitra Sejati tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka perlu dipertimbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengusaha lebih memperhatikan hak-hak pekerja khususnya upah lembur, dengan membuat perjanjian kerja tertulis agar para pekerja lebih mendapatkan perlindungan hukum dan pengusaha harus membayar upah lembur tanpa terkecuali.
2. Pengusaha membuat peraturan perusahaan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum para pekerjanya.
3. Pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman wajib menjalankan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman wajib menegakkan peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika offset, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djumaldi FX, 2005, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lalu Husni, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja Bila diPHK*, PT Visimedia, Jakarta.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu dan upah kerja lembur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per.01/MEN/1999 tentang upah minimum.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Website

<http://www.kamus> Bahasa Indonesia.com.

<http://www.okezone.com>.